



Vol. 8 No. 1, Juni 2024

# Jurnal HISTORICA

E-ISSN: 2964-9269

ISSN: 2252-4673



**Publisher:**  
**History Education Study Program**  
**University of Jember**



Vol. 8 No. 1, 2024

# Jurnal HISTORICA

E-ISSN: 2964-9269  
ISSN: 2252-4673

- |   |     |
|---|-----|
| <i>Oen Boen Ing's Role during Indonesian Independence Revolution Period on 1945-1949</i><br><i>Herdiona Hellen Herdadian, et al.</i>  | 1   |
| <i>Comparison Of Education Policies In Indonesia And Finland As Well As The Implementation Of The Concept Of Multiculturalism In Historical Learning Serta Implementasi Konsep Multikulturalisme Dalam Pembelajaran Sejarah</i><br><i>Inez Kalyana Azmi</i> | 19  |
| <i>The Use Of Chairil Anwar's " Aku" Poem In History Learning</i><br><i>Adita Pratiwi</i>   | 43  |
| <i>Mohammad Roem's Skills As A Negotiator In The Roem-Royen Negotiations</i><br><i>Rifqoti Ulya Dewi</i>  | 53  |
| <i>Moving To Become Kromo Lawi</i><br><i>Petrik Matanasi</i>  | 65  |
| <i>The Impact of Teacher Welfare on School Effectiveness</i><br><i>Diki Darmawan, et al.</i>  | 125 |
| <i>The Effect of Experiential Learning Model Integrated with Teachmint Media on Learning Motivation and Student Learning Outcomes in History Subjects</i><br><i>Sabtiya Pratiwi, et al.</i>   | 136 |
| <i>The Dynamics of Green Revolution Implementation in The Rise Farming Sector in Lamongan from 1970 to 1998</i><br><i>Afrida Nurlaily Romadhona, et al.</i>   | 158 |
| <i>The Effect of Flexiquiz Technology Integrated Problem Based Learning Model on Creative Thinking Skills and Learning Outcomes of Class X Students in History Subject</i><br><i>Pramodia Dyah Rarasandti, et al.</i>                                       | 181 |
| <i>Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia in Banyuwangi</i><br><i>Damar Wicaksono, et al.</i>  | 197 |



## **The Dynamics of Green Revolution Implementation in The Rice Farming Sector in Lamongan from 1970 to 1998**

Afrida Nurlaily Romadhona<sup>1</sup>, Akhmad Ryan Pratama<sup>2</sup>, Mohamad Na'im<sup>3</sup>, Kayan Swastika<sup>4</sup>, Robit Nurul Jamil<sup>5</sup>, Gusti Ngurah Ary Kesuma Puja<sup>6</sup>

<sup>123456</sup> Pendidikan Sejarah, Universitas Jember

Email: nurlailyafrida@gmail.com

### **Abstract**

This research aims to analyze the reasons why Lamongan became the area for implementing the green revolution, along with the implementation of green revolution activities and their impact in Lamongan in 1970-1998. This research uses historical research methods with a city history approach using Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) based agriculture theory. Lamongan Regency, which is currently one of the largest rice producing areas on the island of Java, cannot be separated from the role of the Green Revolution program implemented by the New Order government in Lamongan. Seeing agricultural conditions in the 1960s where there was famine and floods which caused farmers to experience major crop failures, the Lamongan district government together with the New Order government with its agricultural revolution program made improvements starting from the water sector, extension to farmers, and so on which was oriented on increasing agricultural productivity and agricultural life, which is the livelihood of the majority of Lamongan residents. Having relatively stable agricultural land, production of agricultural products in Lamongan continues to increase from year to year. Its contribution reached 8.18% of East Java's total rice production. The impact of the Green Revolution in Lamongan in 1970-1980 can be seen in the economic growth of Lamongan Regency and the social life of farmers. Changes in Lamongan society can be seen in the level of education and educational facilities in Lamongan which continue to develop every year. The increase in the number of rice harvests from year to year during the green revolution, especially in 1984-1989, had an impact on increasing Lamongan regional income. Lamongan Regency's gross regional domestic product (GRDP) index increased. This increase in GRDP was triggered by the rapid increase in productivity in the agricultural sector, during the Green Revolution period 1970-1998.

**Keywords:** Revolution, Agriculture, Lamongan.

## PENDAHULUAN

Pada masa Pemerintahan Orde Baru ini politik tidak lagi menjadi fokus utama oleh para pemimpin pemerintahan, melainkan ekonomi sebagai panglima pembangunan negara kedepannya (Mas'ood M., 1989). Bagaimana tidak, pada masa awal Orde Baru pemerintah dihadapkan banyak persoalan ekonomi yang sedang diguncang inflasi dan krisis dunia. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama pemerintah Orde Baru adalah krisis beras. Antara tahun 1966-1973, Indonesia telah mengalami krisis beras sebanyak lima kali. Hal tersebut membuat pemerintah Orde Baru sadar akan pentingnya ketersediaan bahan pangan, khususnya beras. Selama Orde Baru, industri dan pertanian merupakan dua sektor yang menjadi prioritas untuk mendukung pembangunan pertanian. Bagaimana tidak, pertanian memiliki hubungan erat dan kait-mengait dengan sektor-sektor pertanian lainnya misalnya, perdagangan, pendidikan, dan lain sebagainya (Mubyarto, 1983). Pemerintah Orde Baru meletakkan pembangunan pertanian sebagai fokus utama untuk meningkatkan pendapatan petani. Penghasilan petani yang meningkat akan berdampak pada perbaikan taraf kehidupannya.

Revolusi hijau di Indonesia dicanangkan pemerintah Orde Baru pada awal tahun 1968/1969-an. Pencanaan Revolusi Hijau ini bertujuan sebagai sarana yang akan meningkatkan produksi pangan, khususnya produksi beras secara luar biasa, dengan asumsi bahwa dengan kelimpahan produksi maka akan meningkatkan kesejahteraan rakyat petani. Program revolusi Hijau ini Melalui Program-program bimbingan massal (bimas), intensifikasi massal (inmas) kemudian dikembangkan kegiatan melalui kelompok tani seperti intensifikasi khusus (insus) yang juga sebagai perangkat untuk membantu petani meningkatkan produktivitas usaha taninya telah diadakan misalnya, dalam hal kelembagaan, penyuluhan, kredit, pemasaran dan koperasi dengan harapan dapat merubah tingkat kehidupan petani (Arifin, 1994).

Hasilnya secara konsisten pulau Jawa telah menghasilkan lebih dari 63% total produksi padi di Indonesia sejak awal mulainya program Bimas (Arief, 1999). Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran provinsi Jawa Timur yang menjadi salah satu provinsi penyumbang stok beras nasional (Nurvianto dan Trilaksana,

2014). Produksi berkembang dari 3 juta ton lebih gabah kering pada tahun 1968 menjadi hampir 7,5 ton pada pertengahan tahun 1980-an dan mencapai lebih dari 8 juta ton pada tahun 1989. Akibat dari kenaikan tersebut, Bulog (Badan Urusan Logistik) telah mengonsentrasikan upaya pembelian cadangan pangannya di Jawa Timur, sehingga provinsi ini menjadi pemasok beras yang utama untuk daerah-daerah lain di Indonesia. Salah satu daerah penghasil padi di Jawa Timur adalah Lamongan.

Secara garis besar Wilayah Lamongan daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu Bagian Tengah Selatan, Bagian Selatan dan Utara, dan Bagian Tengah Utara (Faried, 1994). Jenis tanah lahan pertanian di Lamongan didominasi dengan tanah Aluvial, yang meskipun cocok untuk lahan pertanian tetapi memiliki struktur yang berat karena kandungan unsur tanahnya bergantung pada iklim, dan intensitas air yang memadai (Mubyarto, 1989). Maka tidak heran penduduk Kabupaten Lamongan banyak menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perdagangan. Angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian diperkirakan sebesar 52,68%, sektor perdagangan 13,42%, sektor industri pengolahan sebanyak 8,75%, sedang untuk sektor-sektor yang lain sebesar 10,7% (BPS Lamongan, 1981). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor perdagangan dan pertanian menjadi penopang utama dalam pengembangan perekonomian lokal kabupaten Lamongan. Faktor wilayah secara langsung berdampak terhadap profesi penduduk wilayah tersebut.

Dari total 181.280 Ha luas wilayah Lamongan, sebanyak 82.772 Ha merupakan lahan pertanian sawah, hal ini menjadikan lebih dari 50% penduduk Lamongan bermata pencaharian sebagai seorang petani (Faried, 1994). Rendahnya tingkat pendidikan di Lamongan yang hanya berorientasi kepada pendidikan keagamaan, turut menjadikan penduduk Lamongan memiliki keterbatasan terhadap kemampuan yang dimiliki untuk memilih pekerjaan diluar bidang pertanian, sehingga mereka memanfaatkan alam sekitar untuk bertahan hidup. Oleh sebab itu sejak sebelum masa kemerdekaan penduduk Lamongan merupakan seorang petani, jadi rata-rata lahan pertanian tersebut di wariskan sehingga anak dan cucunya kemudian akan menjadi seorang petani juga. Lahan pertanian yang mereka miliki

saat ini merupakan milik pribadi yang diwarisi dari keluarga mereka sebelumnya (Wawancara dengan Ali Irwan, 28 Desember 2023).

Wilayah Lamongan memiliki potensi yang dibutuhkan oleh pemerintah Orde Baru dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan pertanian padi yang bertujuan untuk pemulihan perekonomian Nasional. Maka dibanding dengan daerah penghasil pertanian Padi lainnya di wilayah Jawa Timur, yaitu Jember yang memiliki riwayat pembangunan pertanian dan perkebunan sejak masa kolonial, Lamongan baru mulai akan dikembangkan pada masa Orde Baru ini dengan Revolusi Hijau yang dicengangkan oleh pemerintah. Kondisi pembangunan pertanian di Kabupaten Lamongan memiliki karakteristik berbeda dibanding dengan daerah tempat implementasi lain dikarenakan potensi alam yang memadai dengan penduduk yang banyak bekerja pada bidang pertanian, namun mengharuskan dilakukan banyak perbaikan terutama dalam menaklukkan bentang alam Lamongan. Sehingga keberhasilan dalam pertanian di Lamongan sangat ditentukan oleh bagaimana implementasi revolusi hijau yang dilaksanakan dan bagaimana pembangunan pertanian yang direncanakan oleh pemerintah terhadap Kabupaten Lamongan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kegiatan Revolusi Hijau Di Lamongan Tahun 1970-1998**

#### **A. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Padi di Lamongan Tahun 1970-1998**

Penyuluhan pertanian pada program Revolusi Hijau dilaksanakan dalam program Bimas atau bimbingan masal dan Inmas atau Intensifikasi masal. Menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 546/Kpts/12/org/ 1969, penetapan keorganisasian Bimas dengan dibentuk Badan Pengendali Bimas di tingkat pusat, Badan Pembina Bimas di tingkat provinsi (Dati I), dan Badan Pelaksana Bimas di tingkat kabupaten (Dati II). Masing-masing badan tersebut dipimpin oleh Menteri Pertanian, Gubernur (Kepala Dati I), dan Bupati (Kepala Dati II). Badan Pelaksana Bimas dengan dibentuknya Bimas tingkat kecamatan dan desa baru mulai dibentuk

pada tahun 1971 dengan adanya SK Menteri Pertanian Nomor 248/Kpts/Org/6/1971.

Ada tahapan-tahapan yang nantinya dilakukan petani dalam proses menerima penyuluhan, yaitu: a.) mendengar, dari penyuluh atau siaran di desa, b.) melihat, dari kebun, lahan demonstrasi, dan lain sebagainya, c.) Diskusi atau musyawarah sesama masyarakat tani, d.) bergerak, mengerjakan atas pertimbangannya sendiri berdasarkan apa yang didengar, dilihat, dan dibicarakan (Sekretariat Badan Pengendali Bimas, 1987). Penyuluhan pertanian untuk daerah yang jauh dari kota kecamatan, atau balai penyuluhan pertanian, dilaksanakan oleh aparatur desa. Aparatur desa mengumpulkan para petani dan memberikan pengetahuan kepada petani, petani juga dibebaskan untuk menyampaikan kesulitan dan tantangan yang sedang dihadapi, sehingga aparatur desa dapat memberikan bantuan.

Pada tahun 1974-1979 merupakan masa pematapan Bimas (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2019). Organisasi maupun operasional Bimas terus disempurnakan dan dikembangkan. Badan pelaksana Bimas beserta penyuluh pertanian lapangan di daerah Dati II Lamongan dibagi dengan Wilayah Unit Desa masing-masing, dimana tenaga penyuluh ini disertai areal sawah seluas 600-1000 ha (Sekretariat Badan Pengendali Bimas, 1987). Pada masa ini Bimas disempurnakan dengan adanya kredit sarana produksi yang disediakan oleh pemerintah. Selain kredit pada masa ini Bimas dilengkapi dengan sarana-sarana sebagai berikut, a.) Penyuluhan pertanian lapangan yang melaksanakan penyuluhan di desa-desa, b.) BRI Unit Desa yang bertugas mengurus pengkreditan, c.) Pengecer/kios/warung unit desa yang mengurus penyaluran sarana produksi seperti pupuk, pestisida, benih, dan sarana produksi pertanian lainnya, d.) BUUD (Badan Usaha Unit Desa) dan KUD (Koperasi Unit Desa) yang bertugas mengelola dan memasarkan hasil pertanian (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2019). Di Lamongan tercatat oleh dinas pertanian tahun 1975 sudah ada yang namanya kredit untuk petani, dengan laporan realisasi penggunaan kredit dan pembayaran kembali oleh para petani lewat KUD (BPS Lamongan, 1981).

Koperasi Unit desa di Kabupaten Lamongan terdiri dari Koperasi berbentuk badan hukum (BH) dan belum berbadan hukum (BBH). Koperasi berbadan hukum memiliki izin dan kewajiban sesuai peraturan koperasi oleh pemerintah, sedangkan yang tidak berbadan hukum dimiliki oleh perorangan dan memiliki wewenang tersendiri dalam mengelolanya. Fungsi dari KUD sendiri adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat petani, maka dari itu adanya KUD untuk menyediakan simpan pinjam, sarana pertanian, dan pemasaran hasil pertanian, yang mana semua itu bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.

Setelah pelaksanaan program Bimas, pemerintah menilai Dengan makin berkembangnya Bimas, jumlah petani yang mampu menyediakan sarana produksi secara mandiri (tanpa harus meminjam dari bank) terus bertambah sehingga pada tahun 1973 dikembangkan Intensifikasi Massal (Inmas). Pada masa ini, petani mampu menyediakan sendiri sarana produksi yang diperlukan tanpa penyediaan kredit dari BRI Unit Desa (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2019). Jadi pada intensifikasi masal ini para petani sudah terlepas dari Bimas yang menyediakan kredit dari pemerintah, dan meminjam sendiri pada BRI Unit Desa dalam pemenuhan kebutuhannya.

Tahun 1979-1984 upaya perbaikan dan penyempurnaan penyuluhan terus dilaksanakan. Pada tahun 1979 penyuluhan yang semula lebih pada pendekatan secara perseorangan diubah menjadi pendekatan secara kelompok yang dikenal dengan nama intensifikasi khusus (Insus) (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2019). Intensifikasi Khusus dilakukan kepada kelompok-kelompok petani untuk memudahkan dalam pendistribusian pupuk sampai produktivitas hasil pertanian. Organisasi petani di Lamongan pada setiap kecamatannya terdiri dari P3A. Kelompok tani yang melaksanakan Insus, kelompok tani wanita, dan kontak petani.

Keberhasilan pendekatan kelompok pada tahun 1987 dikembangkan menjadi kerja sama antar kelompok. Kerja sama antar kelompok dalam penyelenggaraan intensifikasi terutama dalam menerapkan pola tanam yang serempak serta keseragaman varietas unggul seluas minimal 1.000 ha dalam satu



hamparan dikenal dengan nama Supra Insus (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2019). Perkembangan penyuluhan ini tertuang dalam pedoman terkait pelaksanaan program Intensifikasi pertanian di Kabupaten Lamongan Tahun 1988/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Bupati Daerah Tingkat II Lamongan. Dalam pedoman tersebut terdapat target luasan areal yang dilaksanakan Supra Insus pada tanaman padi, yaitu seluar 10.000 ha di tahun/musim tanam 1988 dan 15.000 di tahun atau musim tanam paruh kedua 1988-1989 (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2019).

Selain Program Supra Insus, pemerintah kabupaten Lamongan dalam Surat Keputusan Bupati mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian di Kabupaten Lamongan Tahun 1988/1989, melaksanakan pembagian sasaran penyuluhan menjadi Supra Insus, Insus paket yang terdiri dari A hingga D, Insus, dan Inmum. Insus Paket merupakan rekayasa intensifikasi pertanian dengan teknologi pertaniannya, sedangkan Supra Insus adalah rekayasa pertanian terhadap kelompok sosial petaninya.

## **B. Kegiatan Pertanian Padi di Lamongan Tahun 1970-1998**

Para petani di Kabupaten Lamongan tidak dapat melaksanakan cara-cara bertani dengan seragam karena kondisi bentang alam Daerah Lamongan yang berbeda-beda sehingga terdapat 2 jenis padi, yaitu padi gogo dan padi sawah yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan media tanamnya. Padi gogo memiliki karakteristik yang cocok untuk ditanam di Lahan yang berhumus, memiliki ketersediaan air yang sedikit, struktur remah, ketebalan tanah berkisar 25 cm, tanah yang cocok dan mendukung tanaman bervariasi dari yang memiliki tekstur berliat, tekstur berdebu halus, tekstur berlempung halus sampai tanah kasar dengan keasaman tanah 4,0 sampai dengan 8,0. Daerah yang cocok untuk ditanami padi ini adalah wilayah Lamongan bagian selatan hingga hampir tengah, yaitu wilayah Mantup, Tikung, Sugio, Lamongan dan sekitarnya.

Sedangkan padi sawah biasa ditanam pada lahan sawah dengan ciri tanah berlempung dan memiliki lampiran keras 30 cm, menghendaki tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan berkisar 18-22 cm, keasaman tanah berkisar diantara pH 4,0-7,0. Sedangkan daerah utara cocok ditanami oleh padi sawah karena

tanahnya yang berlumpur. Daerah pertengahan Kabupaten Lamongan berupa wilayah Bonorowo dan Bengawan Sungai dengan pengairan yang memadai, tanahnya bisa untuk ditanami kedua jenis padi baik gogo maupun sawah tergantung pada konsentrasi tingkat tanahnya, karena daerah tengah ini pun memiliki karakteristik tanah yang berbeda-beda (Faried, 1994).

Dalam mengairi sawahnya penduduk Lamongan memanfaatkan sungai dan waduk yang telah ada. Waduk yang digunakan penduduk Lamongan seperti Waduk Gondang, Prijetan, Gempol, Balongpanggung, German, Sentir, Caling, Bowo, Jajong, Jotho yang berkapasitas lebih dari 1.000.000 m<sup>2</sup>. Selain aliran irigasi yang dibangun oleh pemerintah, modernisasi pertanian dalam program Revolusi Hijau di Lamongan mengenalkan adanya pompa air. Pompa air banyak digunakan oleh para petani untuk mengalirkan air dari sungai-sungai di sekitar lahan persawahan, sehingga memudahkan petani untuk mengisi lahan pertaniannya dengan air, atau mengeluarkan air dari lahan ketika musim penghujan. Pompa air yang digunakan oleh petani biasanya milik pribadi, desa atau kelompok tani. Selain irigasi masyarakat juga telah beralih ke traktor untuk mengelola lahan sawah (Wawancara dengan Ali Irwan pada tanggal 28 Desember 2023). Traktor digunakan untuk membajak lahan persawahan agar tanah sawah lebih gembur dan mudah untuk ditanami.

Benih dalam yang ditanam menggunakan jenis varietas padi unggul seperti padi Bengawan, Jelita yang kemudian pada tahun 1968 muncul jenis padi PB 5 dan PB 8. Secara produktivitas varietas tersebut mampu memberikan kenaikan produksi, akan tetapi ada beberapa kelemahan yang menjadikan varietas ini tidak disukai karena memiliki rasa yang tidak enak. Pada tahun 1974 penduduk Lamongan menggunakan varietas VUTW atau varietas utama tahan wereng yang merupakan terobosan pembenihan untuk menciptakan salah satu benih unggul diantaranya PB 26 dan PB 30 sedangkan pada musim kemarau penduduk Lamongan menanam varietas genjah karena lebih tahan kering, varietas genjah ini salah satunya adalah IR 36 (Nurvianto, 2014). Penggunaan benih unggul ini dapat mempercepat masa panen menjadi 2 kali dalam satu tahun. Selain itu penyeragaman masa tanam pada satu areal tanam dan pelaksanaan 2 kali tanam padi di selingi 1

kal tanaman palawija dalam satu tahun mampu menahan populasi serangan hama wereng.

Penyaluran benih dilakukan melalui kios penyalur saprodi yang mendapatkan dari BUUD atau pedagang benih. Selain itu benih juga dapat disalurkan langsung ke desa-desa oleh para penyuluh apabila desa tersebut letaknya jauh dari BUUD atau Kios (Sekretariat Badan Pengendali Bimas, 1987). Terlebih pada akhir tahun 1980 pedagang yang membuka kios-kios bahan pertanian semakin banyak, (diluar KUD/pribadi) hal ini terkait dengan peluang usaha pertanian yang tinggi, karena banyak pembelinya sedangkan mobilitas petani terbatas. Belum ada regulasi pemerintah yang mengatur terkait pembatasan kios sarana produksi pertanian sehingga pemilik kios mudah mendapatkan bahan dan alat pertanian untuk dijual kembali hanya dengan memiliki modal yang cukup (Wawancara dengan Mat Lazim pada tanggal 28 Desember 2023).

Bibit yang telah ditanam diberikan nutrisi yang berasal dari pupuk. Sebelum adanya revolusi Hijau petani masih memanfaatkan pupuk-pupuk organik seperti kompos dari kotoran ternak untuk menyuburkan tanah (Wawancara dengan Ali Irwan pada tanggal 28 Desember 2023). Hingga para penyuluh melalui Bimas pada wilayahnya masing-masing mengenalkan pupuk kimia. Pupuk Kimia memiliki peranan penting dalam meningkatkan hasil produktivitas padi. Pupuk kimia yang digunakan seperti UREA, TEF dan TSP. Pada tahun 1974 saja di Lamongan pupuk urea telah tersebar sebanyak 6.366.880 kg dan TSP sebanyak 3.122.475 kg (BPS Jawa Timur, 1975). Mudahnya mendapatkan pupuk, dan adanya subsidi oleh pemerintah menjadikan penggunaan pupuk semakin masif digunakan. Walaupun demikian subsidi yang dilakukan oleh pemerintah juga turut ini menjadikan petani sangat ketergantungan terhadap pupuk kimia.

Setelah penanaman untuk menjaga agar padi tidak di serang hama dan penyakit, Pemerintah mengenalkan pestisida sebagai obat pemberantas hama. Tahun 1974 terdapat 2 jenis pestisida yang disebar untuk para petani di Lamongan yaitu *Inteksida eq. Diazinon* yang berjumlah 18.795 kg dan *Rodentisida Eq. Zinc phosphide* berjumlah 879 kg. Pestisida ini dapat didapatkan petani melalui BUUD maupun kios-kios penyedia bahan pertanian. Pestisida tersebut

diaplikasikan menggunakan alat seperti *Hand Sprayer*, *Knapsack motor sprayer*, *Skid motor sprayer*, Emposan dan *Hand Duster*.

### C. Panen dan Pengelolaan Pasca Panen Pertanian Padi di Lamongan Tahun 1970-1998

Tahap terakhir dalam intensifikasi pertanian revolusi Hijau adalah pengelolaan hasil pertanian. Pada musim panen padi penanganan panen antara kedua jenis yang ditanam penduduk Lamongan mengalami perlakuan yang berbeda. Pada padi sawah, padi dapat dipanen ketika 90-95% butir atau malai sudah menguning (33-36 hari setelah berbunga sesuai dari varietas padi yang dibudidayakan) yang ditandai ketika biji masak fisiologis dengan bagian bawah malai masih terdapat sedikit gabah hijau, kadar air gabah 21-26 %, dan butir hijau sudah rendah. Pemanenan padi sawah dapat dilakukan dengan menggunakan sabit bergerigi yang tajam untuk memperkecil tingkat kerontokan gabah saat panen. Pemanenan lainnya dapat melalui mesin panen terutama untuk sawah yang luas. Tujuannya penggunaan mesin permanen ini untuk mempercepat pemanenan sekaligus meminimalisir kerusakan yang berakibat terhadap kehilangan hasil panen. Adapun cara pemanenannya yaitu dengan pemotongan jerami sekitar 20- 25 cm di atas permukaan tanah, kemudian rumpun padi diletakan dengan cara menumpuknya di atas alas terpal. Padi yang sudah dipanen secepatnya dirontok menggunakan banting bertirai maupun *power thresher* (Sekretariat Badan Pengendali Bimas, 1987). Berikut merupakan hasil dari luas panen dan produksi yang didapatkan padi sawah selama masa Revolusi Hijau di Lamongan sejak tahun 1979-1997:

Tabel 1. Luas Panen dan Produksi Padi Sawah di Lamongan

No.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Untuk bibit (Kg)	Persediaan beras setahun (Kg)
1.	1969	-	1.263.264	-	135,51(padi)

					70,20 (beras)
2.	1979	82.882	3.230.256	47.174	305,61
3.	1980	94.156	4.192.224	47.453	397,23
4.	1981	96.602	3.247.193	33.850	240,29
5.	1982	95.721	3.985.553	28.716	372
6.	1983	97.025	4.086.973	129.108	378
7.	1984	103.842	5.000.616	40.93	-
8.	1985	106.067	5.604.922,37	52.84	-
9.	1986	106.159	5.600.948,84	52.76	-
10.	1987	102.489	5.450.100,55	53,18	-
11.	1988	101.692	6.067. 865,22	59,87	-
12.	1989	102.807	6.173.490,84	60,05	-
13.	1990	102.197	6.359.692,71	62,29	-
14.	1991	101.226	5.949.527,01	58,77	-
15.	1992	110.000	6.644.602,04	60,41	-
16.	1993	108.750	6.465.761,01	59,46	-
17.	1994	108.806	6.474.451.96	59,50	-
18.	1995	119.048	6.929.013,71	58,20	-
20.	1996	111.011	6.398.146.03	57,63	-
21.	1997	116.903	7.060.343,34	60,43	-
22.	1998	115.902	6.588.589.83	56.85	-

Sumber: Diolah dari Lamongan Dalam Angka Tahun 1979-1989

Hasil tanam padi sawah di Lamongan selalu naik setiap tahunnya. Kondisi ini disebabkan saluran irigasi yang semakin baik untuk kegiatan pengairan. Padi paling banyak di hasilkan oleh kecamatan Sekaran. Kecamatan ini memiliki jumlah air yang mencukupi karena berada di dekat sungai bengawan solo. Jumlah lahan sawah meningkat dua kali lipat dari tahun 1979 dengan luas 3 juta hektar menjadi 6,5 juta hektar. Walaupun demikian kebiasaan masyarakat Lamongan dalam menyimpan beras mulai berkurang dimulai pada tahun 1983 merupakan catatan penyimpanan beras untuk persediaan. Selain itu bagi para petani yang telah lewat

masa panen biasanya mereka mencari uang tambahan dengan berkeliling desa untuk menjadi tengkulak dan menjual padi ke huller. Huller terdapat di setiap kecamatan namun yang diketahui berjumlah 23 (Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Dati II Lamongan, 1988). Berbeda dengan Padi gogoh yang terus mengalami penurunan walaupun terkadang naik pada tahun 1989 dan 1994 dengan jumlah lebih dari 1 juta kuintal. Padi gogoh tersebut dihasilkan paling banyak oleh kecamatan Paciran.

Para petani di Lamongan biasanya hanya mengelola hasil padinya sampai menjadi gabah yang dirontokkan saja. Setelah itu sudah ada para tengkulak padi yang membeli hasil pertanian mereka. Sebagian dari mereka yang memiliki kredit kepada KUD maupun pinjaman pertanian lain, maka akan menyetorkan hasil pertaniannya kepada yang memberikan kredit pertanian. Sedangkan para petani yang mandiri lebih memilih menjual gabah kepada para tengkulak. Hal ini dikarenakan mobilitas yang terbatas petani jika menjual hasil pertanian kepada KUD, karena petani harus mengantarkan hasil pertaniannya sendiri. Berbeda dengan para tengkulak yang mendatangi langsung para petani sehingga petani, ini sangat menguntungkan terlebih kepada petani yang lahan pertanian, maupun rumahnya jauh dari pusat KUD/BUUD di daerahnya (Wawancara dengan Iswah pada 30 Desember 2023). Tengkulak kemudian menjual hasil pembelian gabah dari para petani ke pemilik usaha huller/tempat pengolahan gabah, dan pemilik melakukan pengolahan gabah hingga menjadi beras yang kemudian dijual oleh pemilik selep kepada BULOG. Terdapat total 23 gudang huller di Lamongan, dimana Kecamatan Sekaran memiliki pengusaha selep paling banyak, hal ini berbanding dengan hasil produksi padi di Sekaran yang jumlahnya paling banyak dibanding daerah kecamatan lain (Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Dati II Lamongan, 1988).

Harga padi di tentukan oleh pemerintah untuk menjaga ke stabilan harga di pasaran. Penentuan ini disesuaikan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan petani. Dalam rangka pengendalian harga itu, pemerintah mematok harga mengikuti perkembangan moneter yang terjadi pada waktu itu. Saat itu pada tahun 1974 harga gabah kering dipatok sebesar Rp 29,40 per kg yang pada tahun 1975

naik menjadi Rp 40,60. Seiring berubahnya situasi moneter harga gabah kering kembali naik pada tahun 1976, 1977, 1979 berturut-turut menjadi Rp 57,50 , Rp 67,50 dan Rp 85 per kg. Untuk tahun 1979 harga kembali naik lagi menjadi Rp 95 per kg. Harga tersebut diatas merupakan harga terendah dari petani, ketika BULOG membeli gabah-gabah tersebut dari KUD di desa-desa harga berubah menjadi Rp 100 per kg. Seiring dengan laju inflasi sejak tahun 1980 yang merupakan awal titik balik pertanian Indonesia harga beras melonjak menjadi Rp. 300,- per kilogram atau Rp 275,- untuk harga beli dari petani. Harga tersebut masih terbilang terjangkau mengingat pendapatan masyarakat juga mengalami peningkatan seiring ekonomi yang membaik (Nurvianto dan Trilaksana, 2014).

Tercatat selama periode krisis pangan tahun 1970-1979 Bulog secara rata-rata melakukan *dropping* beras guna operasi pasar sebesar 12.000 ton per bulan untuk Jawa Timur atau 150.000 ton per bulan secara nasional. Dan Lamongan turut menyumbang 8,18% dari total produksi beras Jawa Timur. Kenaikan Produksi hasil pertanian, tercatat sejak tahun 1974 sebanyak 276.394 ton, meningkat di tahun 1976 sebanyak 356.234 ton. Dan terus mengalami peningkatan pada tahun 1984 sebanyak 526.276 ton dan tahun 1989 sebanyak 643.999 ton beras. Diketahui juga bahwa Lamongan memiliki lahan pertanian yang relatif stabil, sehingga produksi hasil pertanian di Lamongan terus meningkat dari tahun ke tahun (Husein, Sarkawi. B. Dkk.).

## **Dampak Revolusi Hijau Di Kabupaten Lamongan**

### **A. Dampak Revolusi Hijau Terhadap Petani di Lamongan**

Dalam pelaksanaan program revolusi hijau oleh pemerintah di Lamongan, secara perlahan perekonomian petani dapat meningkat dibuktikan dengan produktivitas hasil lahan pertaniannya yang melimpah, meskipun terdapat program-program yang mengharuskan petani untuk membeli pupuk, bibit, dan obat proteksi tanaman, hasil yang didapatkan petani tetap mampu melebihi modal yang dikeluarkan oleh petani. Berikut data rata-rata pengeluaran dan produksinya oleh petani di tahun 1991:

Tabel 2. Rata-rata Produksi dan Pengeluaran Per Hektar Dari Usaha Tanaman Padi di Lamongan 1987-1988 dan 1991

<b>Tahun</b>	<b>Hasil Petani</b>	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>Keterangan</b>
1987	Rp. 837.129	Rp. 239.914	Padi Gogoh
1987	Rp. 1.455.941	Rp. 209.385	Padi Sawah
1988	Rp. 1.080.812	Rp. 346.612	Padi Sawah
1988	Rp. 614.738	Rp. 191.163	Padi Gogo
1991	Rp. 1.554.495	Rp. 384.660	-

Sumber: Struktur Ongkos Penggunaan Jawa Timur Tahun 1991 dan Struktur Ongkos dan Penggunaan Tenaga Kerja dan Usaha Pertanian Jawa Timur 1987-1988

Sebagai data perbandingan pada tahun 1987 data rata-rata pengeluaran produksi masih berskala keresidenan Bojonegoro, Lamongan termasuk didalamnya. Berdasarkan pada tahun 1987 dan 1989 menurut data Struktur Ongkos dan Penggunaan Tenaga Kerja dan Usaha Pertanian Jawa Timur 1987-1988, masih dibedakan menjadi areal persawahan padi gogo sendiri dan padi Sawah sendiri, yang menunjukkan produksi yang dihasilkan masih di bawah tahun 1991, meski begitu pendapatan produksi yang didapatkan sudah lebih dari 2x lipat jumlah yang dikeluarkan.

Dengan demikian program intensifikasi yang dilakukan pemerintah mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian petani sekaligus meningkatkan penghasilan yang didapatkan oleh petani. Peningkatan hasil pertanian tersebut kemudian mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lamongan yang terlihat pada tingkat pendidikan. Sebelumnya tingkat pendidikan masyarakat Lamongan sangat rendah hanya didominasi oleh lulusan sekolah dasar. Selain faktor ekonomi, jumlah sekolah di Lamongan juga sedikit sehingga kesempatan untuk menempuh pendidikan sangatlah terbatas. Namun setelah pelaksanaan revolusi hijau jumlah pelajar di setiap jenjang pendidikan bertambah setiap tahunnya. Akibatnya Fasilitas pendidikan setiap kecamatan bertambah dan kesempatan mendapatkan pendidikan meningkat. Peningkatan pendidikan juga



memberikan kesempatan pada penduduk Lamongan untuk menempati pekerjaan tertentu seperti pada bidang kesehatan, pendidikan dan lainnya. Pada tahun 1980-an kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan Kabupaten Lamongan merintis usaha lain untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pertanian padi mulai dapat mandiri dan pemerintah melakukan pengembangan di dalam sektor lainnya.

Selain meningkatnya hasil panen padi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia, membuat petani harus mengeluarkan biaya untuk membeli pupuk (Hasil wawancara dengan Mat Lazim. pada tanggal 28 Desember 2023). Petani Lamongan harus menyisihkan hasil pertanian mereka untuk membeli bibit dan pupuk. Hal tersebut terbukti dengan harga pupuk semakin naik yang awalnya hanya Rp. 26.000 menjadi Rp. 49.000 pada 1991 (BPS Jawa Timur, 1992). Penggunaan pupuk dalam jangka panjang juga mengakibatkan tanah menjadi tidak subur karena pupuk kimia dapat meningkatkan Ph tanah menjadi asam. Berkurangnya penggunaan bibit padi lokal di Lamongan menyebabkan musnahnya bibit padi lokal digantikan dengan bibit padi unggulan dari pemerintah menyebabkan keanekaragaman benih padi yang dimiliki menjadi berkurang.

## **B. Dampak Revolusi Hijau Terhadap Perkembangan Perekonomian Kota Lamongan**

Meningkatnya Jumlah panen padi dari tahun ke tahun pada saat revolusi hijau, khususnya pada tahun 1984-1989 berdampak pada peningkatan pendapatan daerah Lamongan. Keadaan perekonomian Lamongan dapat dilihat dari analisa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator ekonomi makro yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan perekonomian wilayah Lamongan. Indeks produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Lamongan terjadi peningkatan. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai produksi Kategori Pertanian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 1983 kontribusi Kategori Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 130.232 kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp. 332.834. pada tahun 1989. Dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp. 1.194.604 di tahun 1998. Nilai PDRB Pertanian bahan pangan mencapai hampir 50% dari total PDRB menunjukkan

sumbangsih pertanian pada perkembangan Kabupaten Lamongan (BPS Lamongan, 1993). Sedangkan sektor lain Nilai yang besar ini juga mengidentifikasi bahwa Kabupaten Lamongan bergantung pada hasil pertanian yang melimpah dan memberikan kontribusi pada pembangunan daerah. Berikut PDRB Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun:

Tabel 2. PDRB Bidang Pertanian Kabupaten Lamongan dari Tahun 1983-1998

Tahun	Total Nilai PDRB	Nilai Bidang	Persentase Pertanian
		Pertanian Tanaman Pangan	Tanaman Pangan
1983	Rp. 225.461.601,10	Rp. 91.391.870	40,54
1989	Rp. 545.454.338,86	Rp. 256.465.306	47,02
1990	Rp. 612.485. 341,49	Rp. 232.941.402	38,03
1991	Rp. 685.638.840,15	Rp. 258.318.279	37,68
1992	Rp. 811.539.679,66	Rp. 346.180.684	42,66
1993	Rp. 923. 149. 835,93	Rp. 351.918.990	38,63
1994	RP. 948.470,040,00	Rp. 331.952.510	34,26
1995	Rp. 1.010.282.500,00	Rp. 349.136.040	35,44
1996	Rp. 1.078.571.450.00	Rp. 349.229.270	34,55
1997	Rp. 1.128.621.690.00	Rp. 365.113.860	35,99
1998	Rp. 1.107.104.800.00	Rp. 367.747.000	39,50

Sumber: Diolah Dari Data Statistik PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 1983, 1989, 1990-1998

Salah satu indikator pengembangan ekonomi lokal Lamongan juga dapat dilihat dari kemampuan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, dengan nilai PDRB sub sektor pertanian yang meningkat, menandakan pertanian padi telah berperan dalam menyerap tenaga kerja (Saragih, 2018). Perbandingan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian tanaman pangan di Lamongan antara tahun 1983 dan 1993 meningkat hingga 12.066 ribu jiwa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pertanian padi di Lamongan baru mulai akan dikembangkan pada masa Orde Baru ini dengan Revolusi Hijau yang dicengangkan oleh pemerintah. Kondisi pembangunan pertanian di Kabupaten Lamongan memiliki karakteristik berbeda dibanding dengan daerah tempat implementasi lain dikarenakan potensi alam yang memadai dengan penduduk yang banyak bekerja pada bidang pertanian, meskipun demikian mengharuskan dilakukan banyak perbaikan terutama dalam menaklukkan bentang alam Lamongan.

Banjir dan kekeringan di Lamongan sampai menjadi rutinitas tahunan masyarakat Lamongan dan inilah yang menjadikan perekonomian dan pertanian Lamongan tidak dapat berkembang. Pemerintah kabupaten Lamongan bersama dengan pemerintah orde baru, dengan program revolusi pertaniannya, melakukan perbaikan dimulai dari sektor perairan, penyuluhan kepada para petani, dan lain sebagainya yang berorientasi untuk kembali meningkatkan produktivitas pertanian dan kehidupan pertanian yang sebagian besar merupakan mata pencaharian penduduk Lamongan.

Hasil dari pelaksanaan revolusi hijau menjadikan petani dapat bertani dan melakukan panen padi setahun hingga 2 kali, berbeda dengan sebelum pelaksanaan yang hanya dapat dilaksanakan 1 tahun sekali. Produktivitas pertanian ini kemudian menjadikan Lamongan turut menyumbang 8,18% dari total produksi beras Jawa Timur. Kenaikan Produksi hasil pertanian, tercatat sejak tahun 1974 sebanyak 276.394 ton, meningkat di tahun 1976 sebanyak 356.234 ton. Dan terus mengalami peningkatan pada tahun 1984 sebanyak 526.276 ton dan tahun 1989 sebanyak 643.999 ton beras. Diketahui juga bahwa Lamongan memiliki lahan pertanian yang relatif stabil, sehingga produksi hasil pertanian di Lamongan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dampak dilaksanakan revolusi hijau di Lamongan tahun 1970-1980 terlihat dalam perubahan sosial petani dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan. Perubahan masyarakat Lamongan terlihat pada tingkat pendidikan dan fasilitas pendidikan di Lamongan yang terus bertambah setiap tahun. Meningkatnya Jumlah panen padi dari tahun ke tahun pada saat revolusi hijau, khususnya pada tahun 1984-

1989 selain berdampak kepada kesejahteraan petani, juga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah Lamongan. Indeks produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Lamongan terjadi peningkatan. Peningkatan PDRB ini dipicu oleh produktivitas hasil dari sektor pertanian yang meningkat pesat, selama masa Revolusi Hijau tahun 1970-1998.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Akhmad Ryan P., S.Hum., M.A selaku dosen pembimbing utama dan Dr. Mohamad Na'im, M.Pd. selaku pembimbing anggota sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dan pikiran sebagai teman diskusi penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan motivasi serta dukungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip dan Terbitan Resmi Pemerintah

- Arsip Perpustakaan Lamongan Tentang Nota Ijin Pendirian Bangunan Usaha Gudang Huller
- Badan Pusat Statistik. 1991. *Struktur Ongkos Penggunaan Jawa Timur Tahun 1991*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik. 1964. *Statistik Sensus Pertanian 1964*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan
- Badan Pusat Statistik. 1980. *Statistik Kabupaten Lamongan 1979-1980*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan
- Badan Pusat Statistik. 1983. *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 1981-1983*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan.
- Badan Pusat Statistik. 1983. *Statistik Sensus Pertanian 1983*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan
- Badan Pusat Statistik. 1984. *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 1984*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan.
- Badan Pusat Statistik. 1984. *Statistik Perkembangan Harga Produsen Hasil-hasil Pertanian 1980-1984*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur

- Badan Pusat Statistik. 1984. *Statistik Sosial dan Kependudukan 1984*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan
- Badan Pusat Statistik. 1985. *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 1985*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan.
- Badan Pusat Statistik. 1986. *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 1986*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan.
- Badan Pusat Statistik. 1986. *Statistik Potensi Desa 1986*. Lamongan. BPS Kabupaten Lamongan
- Badan Pusat Statistik. 1986. *Statistik Sensus Ekonomi 1986*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik. 1987. *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 1987*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan.
- Badan Pusat Statistik. 1987. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II Provinsi Jawa Timur 1984-1987*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik. 1988. *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 1988*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan.
- Badan Pusat Statistik. 1989. *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 1989*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan.
- Badan Pusat Statistik. 1989. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II Provinsi Jawa Timur 1986-1989*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik. 1990. *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 1990*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan.
- Badan Pusat Statistik. 1990. *Statistik Sensus Penduduk Kabupaten Lamongan 1990*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan
- Badan Pusat Statistik. 1991. *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 1991*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan.
- Badan Pusat Statistik. 1992. *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 1992*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan.
- Badan Pusat Statistik. 1993. *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 1993*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan.

- Badan Pusat Statistik. 1993. *Statistik Potensi Desa 1993*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan
- Badan Pusat Statistik. 1993. *Statistik Sensus Pertanian 1993*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan
- Badan Pusat Statistik. 1994. *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 1994*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan.
- Badan Pusat Statistik. 1996. *Statistik Alat-alat Pertanian Jawa Timur 1995-1996*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik. 1996. *Statistik PDRB 1993-1996*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan
- Badan Pusat Statistik. 1992. *Harga Produsen Hasil-Hasil Pertanian Dan Barang Penting Lainnya Dipegang Jawa Timur 1982-1992*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik. 1987. *Perbedaan Harga Hasil Pertanian di Pedesaan Jawa Timur Tahun 1983-1987*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik. 1995. *Perbedaan Harga Hasil Pertanian di Pedesaan Jawa Timur Tahun 1991-1995*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik. 1986. *Potensi Desa di Lamongan 1986*. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan
- Badan Pusat Statistik. 1974. *Statistik Jawa Timur Dalam Angka Tahun 1974*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur
- Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 665 Tahun 1986. *Pemberian Bantuan Kredit Modal Bagi Petani*. Lamongan
- Keputusan Menteri Pertanian No. 546/Kpts/12/org/ 1969. Tentang Badan Pengendalian Bimas
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1979. *Badan Koordinasi Bimas*. Jakarta
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2019. *Sejarah Pertanian Indonesia* Jakarta: Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian
- Peraturan bidang perekonomian tahun 1980. Arsip Pemerintah Kabupaten Lamongan

- Sekretariat Badan Pengendali Bimas. 1987. *Vademecum Bimas Volume III*.  
 Jakarta: Departemen Pertanian.
- Sekretariat Badan Pengendali Bimas. 1987. *Vademecum Bimas Volume IV*.  
 Jakarta: Departemen Pertanian.
- SK Menteri Pertanian Tahun 1967 Tentang Penyerahan Proyek Bonorowo kepada  
 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Tentang Pedoman  
 Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian di Kabupaten Lamongan  
 Tahun 1988/1989.
- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 248/Kpts/Org/6/1971. Tentang Badan  
 Pelaksanaan Bimas
- TAP MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967. Tentang pencabutan kekuasaan  
 pemerintahan negara dari Presiden Soeharto.

## **Artikel, Jurnal dan Laporan**

- Bulog. 2018. *Sesper Perum Bulog: Impor beras itu keputusan pemerintah yang harus dilaksanakan*. Diakses pada 27 September 2019 dari <http://www.bulog.co.id/berita/37/6504/10/2/2018/SesperPerum-Bulog-:-Impor-Beras-Itu-KeputusanPemerintah-Yang-Harus-Dilaksanakan.html>.
- Bulog. 2018. *Peraturan Menteri Perdagangan No. 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kementerian Perdagangan. (2018)*. Metodologi (ISP). Diakses 27 September 2019 dari <https://www.kemendag.go.id/addon/isp/>.
- Muamaroh, L. 2017. *Pelaksanaan Program Bimbingan Massal (Bimas) Padi di Kabupaten Tulungagung Tahun 1984-1998*. *Avatara* 5(2): 402-416
- Muchsin, H. 1998. Kebijakan Pertanahan Nasional (Telaah Kritis dalam Perspektif Historis). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 28(4) 262-279.
- Nurvianto dan Trilaksana. 2014. *Intensifikasi Pertanian Tanaman Padi Dalam Rangka Swasembada Beras Provinsi Jawa Timur Tahun 1969-1984*. (AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 2 No. 3

- Paipan dan Muhammad. *Determinan Ketergantungan Impor Beras di Indonesia*. (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 11, No. 1. Juni 2020) hal 53
- Rostow, W. W. 1959. *The Stages Of Economic Growth. The Economic History Review* 12(1).
- Siahaan dan Purnomo, 1997: 78 dalam Astiono dan Parwata. *Peran Kepemimpinan Muhammad Noer dalam menjabay Gubernur Jawa Timur 1967-1976*. (Artikel Penelitian Mahasiswa Studi Ilmu Sejarah, Universitas Jember. 2013)
- Subkhan, I. 2014. GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Aspirasi* 5(2) 131-141.
- Yulia, D. 2019. Revolusi Hijau Kebijakan Ekonomi Pemerintah Bidang Pertanian Di Kanagarian Selayo Tahun 1974-1998. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 4(2): 78-89.
- Yulia. *Revolusin Hijau Kebijakan Ekonomi Pemerintah Bidang Pertanian di Kanagarian Selayo Tahun 1974-1998*. (Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah. 2019. 4:2)
- Sajogya. *Modernization Without Development in Rural Java, a Paper Contributed to The Study on Changes in Agrarian Structures, Organized by FAO of The U.N., 1972-1973*. Bogor: Bogor Agricultural University. (1974).

### **Buku**

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1999. *Pembangunan Lima Tahun di Propinsi Jawa Timur 1969-1988*. Surabaya: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fahrika, Andi. 2020. *Perekonomian Indonesia dan Perkembangannya*. Makasar: Yayasan Barcode.
- Fakultas Pertanian IPB. 2002. *Tahun 1963 Perguruan Tinggi Menjawab Tantangan Masalah Pangan*. Bogor: IPB Press.
- Farid. 1994. *Lamongan Memayu Raharjaning Praja*. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
- Husein, Sarkawi. B. Dkk. 2018. *Sejarah Lamongan dari Masa ke Masa*. Surabaya: Airlangga University Press.



- Khudori. 2008. *Ironi Negeri Beras*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lohanda, M. 2011. *Membaca sumber menulis sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mas'oed, M. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.
- Mubyarto. 1983. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Robinson, R. 2012. *Soeharto & bangkitnya kapitalisme Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu
- Saragih. J. R. 2018. *Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Scott, J, C. 1981. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3ES.
- Sjamsuddin, H. 2012. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Soepeno, B. 2018. *Fungsi dan Aplikasi Teori Dalam Penelitian Sosial*. Jember: Universitas Jember Press.
- Sugiyanto. 2009. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jember: Universitas Jember.

### **Sumber Wawancara**

- Wawancara dengan Abdul Salam pada tanggal 31 Desember 2023
- Wawancara dengan Ali Irwan pada tanggal 28 Desember 2023
- Wawancara dengan Iswah pada tanggal 30 Desember 2023
- Wawancara dengan Mat Lazim pada tanggal 28 Desember 2023